

OPTIMALISASI PERENCANAAN ANGGARAN DANA, BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS DATA RAPOR PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEKABUPATEN KUBU RAYA



**(SYARIF MUHAMMAD FIRDAUS, S.PD., M.PD)
NIP 197609161999031005**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUBU RAYA
2023**



B I O D A T A

Nama Lengkap:
Syarif Muhammad Firdaus, S.Pd., M.Pd

Nomor Induk Pegawai:
197609161999031005

Tempat dan Tanggal Lahir:
Pontianak, 16 September 1976

Jenis Kelamin: Laki-laki
Agama: Islam

Status Pernikahan: Menikah

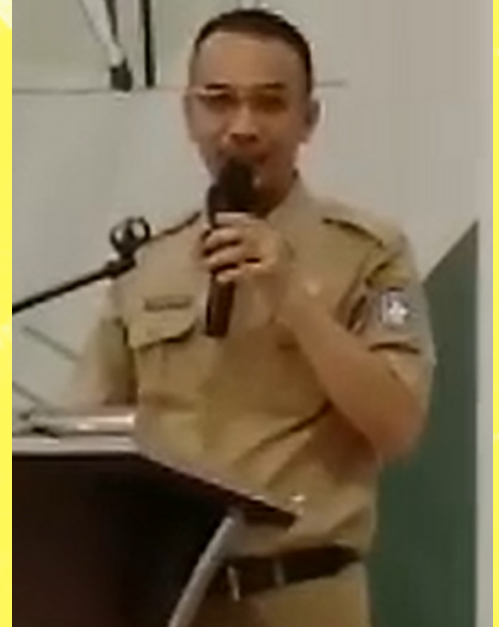
Pangkat/Golongan Ruang: Pembina, IV/a

Unit Kerja:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya

Alamat Rumah:
Jalan Pemda, Komplek Saigon Residence Blok D 27,
Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak

Alamat Email : sy.m.firdaus@gmail.com

Pendidikan:
Magister, Jurusan Administrasi Pendidikan (2008)
UHAMKA Jakarta



EXECUTIVE SUMMARY

This report is a description of the design and implementation of a change action entitled *Data-Based Planning (Optimization of Operational Assistance Budget Planning for Education Units Based on Education Report Card Data at Junior High School Level in Kubu Raya District)*, compiled by **Syarif Muhammad Firdaus, S.Pd. M.Pd.**, as a participant of Administrator Leadership Training Batch IV which is being held by the Human Resources Development Agency for West Kalimantan Province in 2023, under the guidance of Mr. **M. Ayub S.Pd** as Mentor and Mr. **Drs. Robertus Isdius, M.Si** as the Coach.

This change action was designed and implemented to optimize BOSP budget planning based on education report card data, especially at the SMP level in Kubu Raya district, which based on initial data showed figures that were not optimal and needed to be made several breakthroughs/innovations to improve it.

Starting from these conditions, several innovations were carried out as follows: 1. Formed a SMP Level BOSP Work Unit; 2. Formulate and determine Service Standards and Standard Operating Procedures (SP/SOP) for BOSP Services; 3. Provide assistance to SP to prepare BOSP budget planning based on education report cards. These three change agendas are implemented through several stages starting from meetings, building shared commitments, forming an effective team, debriefing, outreach, to implementing mentoring. These stages are implemented accompanied by strengthening communication to related parties both internally and externally, formally and non-formally.

After being implemented step by step, with the full support of the entire Effective Team and internal and external networks, the entire change action plan can be implemented properly with very encouraging results where several stages can be completed faster than the target. More than that, along with the strengthening of support from various parties, the stages that were originally designed for the medium and long term were also completed in the short term.

Quantitatively, the adoption rate for junior high school education report cards in Kubu Raya soared from 63.01% to 100% (an increase of 36.99%), while the portion of data-based budget planning jumped from IDR1.735.434.939,- to IDR10.041.447.165,- or increase from 5.86% to 33.93% of the entire junior high school BOSP budget of IDR29.591.760.000,-. This value is interpreted as the effectiveness of the use of the SMP BOSP budget. Budget efficiency with innovative action changes can also generate at least IDR4.583.100.000,- per year (calculations use the minimum value/tariff with the current number of SMP in Kubu Raya as many as 156).

Concerning that the medium-term and long-term change action stages have been fulfilled in the short term, in the future performance quality improvement will be more directed at maintaining the improvements that have been achieved and disseminating innovations to other parties who also manage similar programs, for example in the field of schooling/Elementary School level and Early Childhood Education.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini merupakan deskripsi atas rancangan dan implementasi aksi perubahan yang berjudul *Perencanaan Berbasis Data (Optimalisasi Perencanaan Anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Berbasis Data Rapor Pendidikan Pada Jenjang SMP Sekabupaten Kubu Raya)*, disusun oleh **Syarif Muhammad Firdaus, S.Pd. M.Pd.**, selaku Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, dibawah bimbingan Bapak **M. Ayub S.Pd** selaku Mentor dan Bapak **Drs. Robertus Isdius, M.Si** selaku Coach.

Aksi perubahan ini dirancang dan diimplementasikan untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran dana BOSP berbasis data rapor pendidikan khususnya pada jenjang SMP sekabupaten Kubu Raya yang berdasarkan data awal menunjukkan angka yang belum optimal dan perlu dilakukan beberapa terobosan/inovasi untuk memperbaikinya.

Bertitiktolak dari kondisi tersebut dilakukan beberapa inovasi sebagai berikut: 1. Membentuk Satuan Kerja BOSP Jenjang SMP; 2. Merumuskan dan menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SP/SOP) Pelayanan BOSP; 3. Melakukan pendampingan terhadap SP untuk menyusun perencanaan anggaran BOSP berbasis data rapor pendidikan. Tiga agenda perubahan ini diimplementasikan melalui beberapa tahapan mulai dari rapat-rapat, membangun komitmen bersama, pembentukan tim efektif, pembekalan, sosialisasi, hingga pelaksanaan pendampingan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan diiringi penguatan komunikasi kepada pihak terkait baik internal maupun eksternal, secara formal maupun non formal.

Setelah dilaksanakan tahapan demi tahapan, dengan dukungan penuh dari seluruh Tim Efektif dan jejaring internal maupun eksternal, seluruh rancangan aksi perubahan dapat diimplementasikan dengan baik dengan hasil yang sangat menggembirakan dimana beberapa tahapan dapat terselesaikan lebih cepat dari target. Lebih dari itu seiring menguatnya dukungan dari berbagai pihak tahapan yang sedianya dirancang untuk jangka menengah dan jangka panjang turut terselesaikan pada jangka pendek.

Secara kuantitatif, capaian tingkat adopsi rapor pendidikan jenjang SMP di Kubu Raya melonjak dari angka 63,01% menjadi 100% (naik sebesar 36,99%) sedangkan porsi perencanaan anggaran berbasis data melonjak dari Rp1.735.434.939,- menjadi Rp10.041.447.165,- atau meningkat dari 5,86% menjadi 33,93% dari keseluruhan anggaran BOSP jenjang SMP sebesar Rp 29.591.760.000,-. Nilai ini diinterpretasikan sebagai efektifitas pemanfaatan anggaran BOSP jenjang SMP. Efisiensi anggaran dengan adanya inovasi aksi perubahan diproyeksi mencapai sekurang-kurangnya sebesar Rp 4.583.100.000,- per tahun (perhitungan menggunakan nilai/tarif minimal dengan jumlah SMP di Kubu Raya saat ini sebanyak 156).

Memperhatikan bahwa tahapan aksi perubahan jangka menengah dan jangka panjang telah terpenuhi pada jangka pendek maka pada waktu yang akan datang perbaikan kualitas kinerja akan lebih diarahkan untuk memelihara peningkatan yang telah diraih serta mendiseminasikan inovasi kepada pihak lain yang juga mengelola program serupa pada bidang persekolahan/jenjang Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.

PENDAHULUAN

Satuan pendidikan (SP), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) merupakan unit pelaksana penyelenggara pelayanan dasar bidang pendidikan. SP merupakan ujung tombak pelayanan bidang pendidikan dan berkontribusi besar terhadap kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Salah satu faktor penting untuk mendukung terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan berkualitas adalah pembiayaan.



BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)

Salah satu sumber pembiayaan untuk operasional pelayanan pendidikan di sekolah, yang disediakan oleh pemerintah adalah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yaitu dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Dana ini diberikan kepada semua sekolah yang memenuhi persyaratan, baik berstatus negeri maupun swasta dan digunakan untuk mendukung pembiayaan-pembiayaan operasional yang dibutuhkan. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan dengan indeks sebesar Rp. 1.320.000,- per peserta didik per tahun.



Demi menjamin tertib pengelolaan dan pemanfaatan BOSP pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengeluarkan pedoman pengelolaan, yang terakhir melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2023. Pada juknis ini salah satu cara untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana BOSP agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, pada Pasal 62 ayat 2 huruf i disebutkan bahwa Satuan Pendidikan harus menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri yang datanya diperoleh dari rapor pendidikan.

RAPOR PENDIDIKAN SEBAGAI BASIS DATA PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN

MENGAPA RAPOR PENDIDIKAN ?

RAPOR PENDIDIKAN KEMENDIKBUDRISTEK TERIMA PENGHARGAAN INTERNASIONAL

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meraih **Recognition of Excellence**, sebuah penghargaan bergengsi dari OpenGov Asia pada 3 Agustus 2023 lalu. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi inovatif dan revolusioner dalam teknologi melalui platform "Rapor Pendidikan" yang berhasil dibangun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).. Penghargaan OpenGov Asia diberikan kepada berbagai jenis organisasi sektor publik, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, perusahaan yang berhubungan dengan pemerintah atau *government-linked companies (GLC)*, dan institusi jasa keuangan atau *financial services institutions (FSI)*. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang telah mengaplikasikan teknologi dengan cara yang inovatif dan mengganggu disruptif melalui peningkatan proses, penyediaan layanan yang berfokus pada manusia, serta mendorong batasan-batasan baru.



PLATFORM RAPOR PENDIDIKAN



Selamat Datang di Rapor Pendidikan

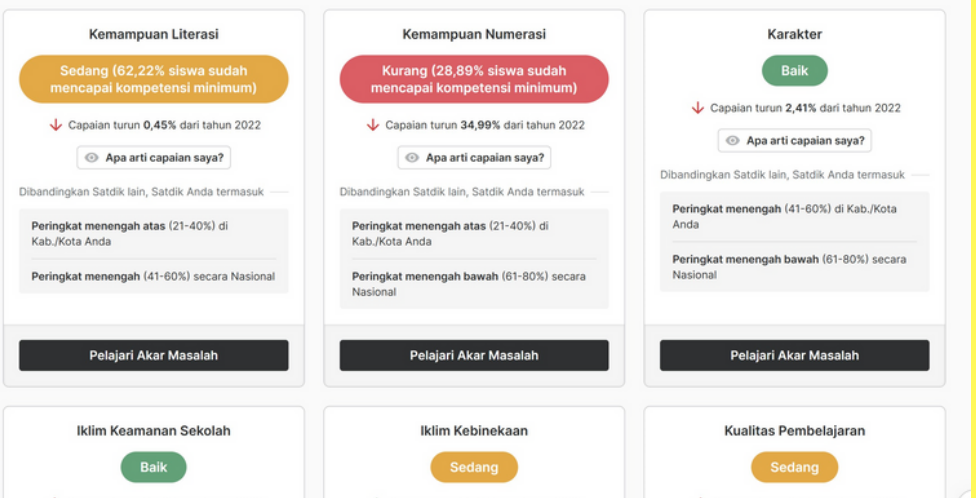
Rapor Pendidikan menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan (satdik) atau daerah.

Satdik dan dinas dapat menjadikan Rapor Pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Lihat Hasil Satuan/Dinas Pendidikan Anda

Masuk dengan Akun [belajar.id](#) [Lupa Akun?](#)

Tampilan Rapor Pendidikan paling baik dilihat lewat Firefox/Chrome di komputer/laptop



DETAIL >

RAPOR PENDIDIKAN APA SIH?

Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan. Platform Rapor Pendidikan didasari oleh Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Sumber data rapor pendidikan adalah hasil Asesmen Nasional, Dapodik, SIMPKB, BPS, dan sumber lain yang relevan.

Manfaat Rapor Pendidikan:

- Referensi utama analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan.
- Platform untuk melihat hasil Asesmen Nasional.
- Sumber data yang objektif dan andal.
- Instrumen pengukuran yang berguna sebagai evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan.
- Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output).
- Platform penyajian data yang terpusat bagi satuan pendidikan.

RANCANGAN AKSIPERUBAHAN



MENGAPA DIPERLUKAN AKSI PERUBAHAN KUALITAS KINERJA

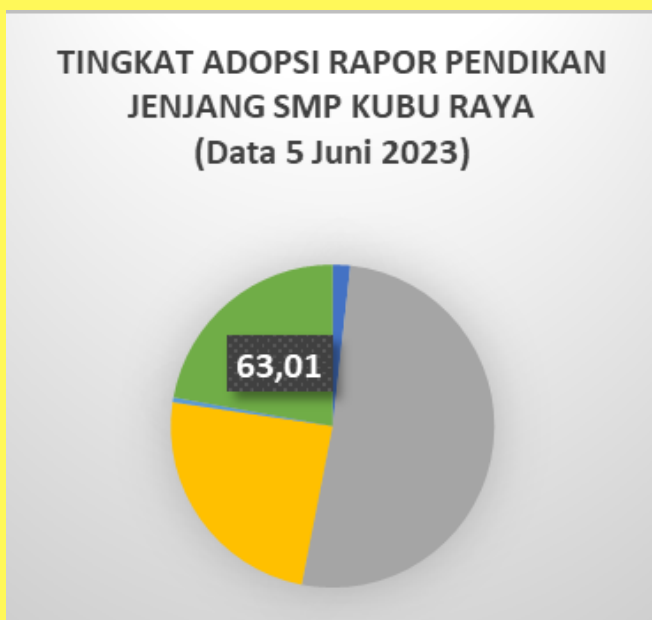
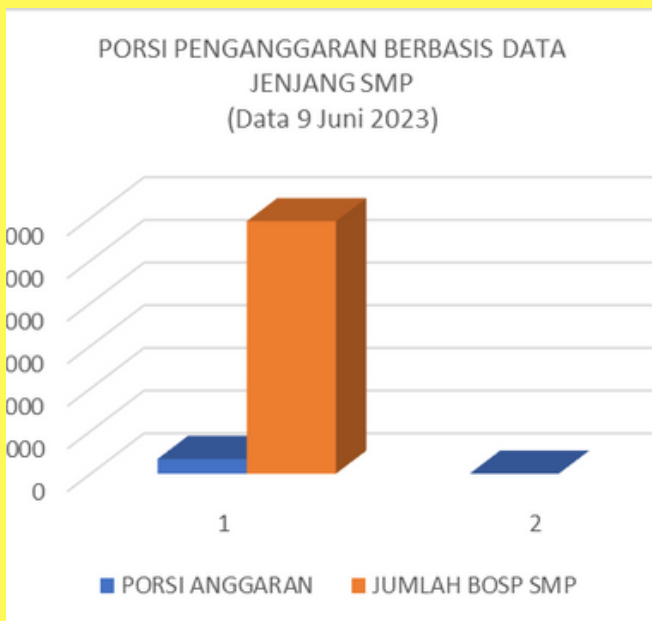
Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat menjawab kebutuhan organisasi atau memperbaiki persoalan dan kelemahan yang sedang dihadapi. Perencanaan yang baik harus berbasis data valid dan akurat. Perencanaan seperti ini disebut dengan Perencanaan Berbasis Data (PBD). Sayangnya masih belum semua SP menyadari pentingnya PBD. Berdasarkan data awal Juni 2023 baru 63,01% SMP di Kabupaten Kubu Raya yang mengakses rapor pendidikan dan belum optimal memanfaatkannya sebagai basis data perencanaan dan penganggaran.

Dari total Dana BOSP Rp 29,5 M, baru Rp1.7 M atau 5,86% yang dianggarkan berbasis data rapor pendidikannya. Data ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran BOSP berbasis data pada jenjang SMP di Kubu Raya masih belum optimal.

Setelah didiagnosis lebih lanjut terungkap sekurang-kurangnya 12 faktor penyebab masalah "belum optimalnya perencanaan anggaran BOSP berbasis data rapor pendidikan pada jenjang SMP". 12 faktor penyebab masalah ini saling terkait satu dengan lainnya meliputi aspek Man, Machine, Material, Methode, dan Money. Terungkap pula satu aspek lainnya terkait Mindset, dalam hal ini persepsi cara pandang pihak-pihak terkait yang belum tepat terhadap PBD.

Ke 12 faktor penyebab masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum dibentuknya tim yang khusus menangani pelayanan BOSP
2. Belum optimalnya pelibatan jejaring internal (pengawas pembina sekolah).
3. Belum tersosialisasikannya rapor pendidikan dan pemanfaatannya.
4. Belum adanya pendampingan perencanaan anggaran BOSP berbasis data rapor pendidikan.
5. Belum dilakukannya verifikasi dan validasi RKAS.
6. Belum ditetapkannya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perencanaan anggaran BOSP.
7. Belum semua sekolah mengakses rapor pendidikan karena terbatasnya sarana.
8. Belum semua sekolah mengakses rekomendasi perencanaan berbasis data karena terbatasnya sarana.
9. Belum tersedianya anggaran pembentukan tim BOSP.
10. Belum tersedianya anggaran sosialisasi rapor pendidikan dan PBD.
11. Belum optimalnya cara pandang sekolah terhadap rapor pendidikan dan PBD.
12. Belum samanya persepsi para pihak terhadap pentingnya PBD.



DATA PER TANGGAL 5 JUNI 2023 MENUNJUKKAN PERENCANAAN ANGGARAN BOSP BERBASIS DATA RAPOR PENDIDIKAN PADA JENJANG SMP DI KUBU RAYA MASIH BELUM OPTIMAL.

DIPERLUKAN INOVASI DAN TEROBOSAN UNTUK MEMPERBAIKI KONDISI TERSEBUT

DESKRIPSI

PROSES KEPEMIMPINAN

MEMBANGUN INTEGRITAS

KOMITMEN BERSAMA AKSI PERUBAHAN

Tahapan ini dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pemetaan terhadap stakeholder terkait secara langsung terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan kemudian mengundang pihak-pihak tersebut untuk berkoordinasi guna menyamakan persepsi terhadap rancangan aksi perubahan yang akan dilaksanakan.

Pihak-pihak yang diundang adalah Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Administrator/Kabid dari bidang lain di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Pejabat Pengawas bidang PSMP, Pejabat Pengawas Renjakeu, Pelaksana Bidang Pembinaan SMP, dan seluruh Pengawas Sekolah jenjang SMP.

Pada kesempatan ini disampaikan rancangan aksi perubahan yang akan dilaksanakan, mengapa perlu melaksanakan aksi perubahan tersebut, hingga mengajak semua pihak untuk bersama mendukung implementasi aksi sesuai kewenangannya.

Poin penting lainnya yang disampaikan adalah aksi perubahan yang dilaksanakan juga untuk mencapai tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan".

Semua pihak menyatakan kesiapan untuk ambil bagian dari perubahan yang akan dilakukan sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.

Sebagian dari pihak yang hadir kemudian ditetapkan sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan,



INDUSTRY >

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

Tim Efektif dibentuk dengan mempertimbangkan tiga kriteria yaitu: 1) saat identifikasi stakeholder termasuk kelompok promoters dan defenders, 2) berada di lingkungan terdekat sehingga akan lebih memudahkan komunikasi, 3) ikut dalam membangun Komitmen Bersama. Berdasarkan kriteria ini terbentuk Tim Efektif yang terdiri dari 8 orang. Tim ini kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.



DETAIL >

PENGELOLAAN BUDAYA KERJA ADHOCRACY, MEMBANGUN JEJARING DAN KOLABORASI

Untuk mempermudah dan mempercepat proses dibangun budaya kerja yang mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pemanfaatan TIK dalam memberikan pelayanan dan mulai diikut diterapkan pada aksi perubahan dibutuhkan untuk mempercepat pelayanan sekaligus lebih mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja. Mendorong dan mendampingi seluruh SP untuk memanfaatkan Platform Rapor Pendidikan dan sistem ARKAS merupakan salah satunya upaya yang dilakukan.

Untuk mewujudkan hal ini dibangun budaya adhokrasi (*Adhocracy Culture*) dimana seluruh personil didorong untuk berpikir kreatif untuk lahirnya ide-ide kreatif demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Budaya ini terbukti melahirkan ide-ide kreatif yang berasal dari tim sehingga terwujud percepatan pencapaian target aksi perubahan yang sedang dilakukan. Target-target dan tujuan yang sebelumnya dirancang untuk jangka menengah dan panjang sebagian besar telah mampu direalisasikan pada jangka pendek.

Selanjutnya sesuai tahapan dibentuk Satuan Kerja Pelayanan (Satker) BOSP Jenjang SMP. Selain merupakan tahapan, pembentukan satker juga merupakan salah satu bentuk optimalisasi jejaring dan kolaborasi yang dilakukan pada aksi perubahan ini karena anggota satker terdiri dari personil internal bidang pembinaan SMP ditambah dengan personil eksternal yaitu para Pengawas Pembina SMP. Kolaborasi apik yang terbangun kemudian menghasilkan pencapaian diatas ekspektasi (melampaui target jangka pendek dan jangka menengah). Menanjak !!

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA BOSP



"BUKAN TIM BIASA"

Satker BOSP Jenjang SMP merupakan tim yang khusus melakukan pelayanan terhadap SP untuk mengoptimalkan pelayanan seputar tata kelola BOSP yang diterima dan dikelola oleh SP, termasuk didalamnya perencanaan penganggaran berbasis data rapor pendidikan. Satker BOSP berisikan personil-personil yang memiliki pemahaman dan kecakapan khusus seputar BOSP, mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaporannya. Tim ini sengaja dikemas dalam bentuk Satuan Kerja (satker) untuk memberikan pesan bahwa ini "bukan tim biasa", melainkan sebuah satuan kerja khusus yang dibentuk dari personil-personil pilihan dan diberikan tanggungjawab yang besar dan khusus.



Satker BOSP terdiri dari unsur internal Bidang Pembinaan SMP yang diperkuat unsur Pengawas SMP, ditambah beberapa pelaksana yang memiliki kemampuan Teknologi Informasi.



Perumusan dan Penetapan Standar Pelayanan / Standar Operasional Prosedur Pelayanan BOSP

SP/SOP Penyusunan RKAS

Didalamnya mengatur tentang standar dan mekanisme pelayanan berupa waktu, biaya, kelengkapan administrasi yang diperlukan, serta petugas/penanggungjawab yang melayani keperluan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Ada tahapan verifikasi dan validasi terhadap program dan atau kegiatan yang direncanakan oleh satuan pendidikan.

Verval ini untuk memastikan bahwa program/kegiatan yang disusun oleh satuan pendidikan telah mengacu kepada Rapor Pendidikan

SP/SOP Pelaporan BOSP

Didalamnya mengatur tentang standar dan mekanisme pelayanan berupa waktu, biaya, kelengkapan administrasi yang diperlukan, serta petugas/penanggungjawab yang melayani keperluan PELAPORAN BOSP yang diterima oleh Satuan Pendidikan.

Ada tahapan verifikasi dan validasi terhadap belanja yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Verval ini untuk memastikan bahwadana BOSP yang diterima telah dibelanjakan sesuai rencana yang telah disusun, didukung bukti belanja, dan telah dibukukan dengan benar.

Perumusan SP/SOP pelayanan BOSP bidang pembinaan SMP dilakukan oleh satker BOSP Bersama Tim Efektif dengan meminta masukan dari berbagai pihak internal maupun eksternal diantaranya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. SP/SOP dimaksudkan untuk memperjelas standar pelayanan sehingga menjadi lebih jelas dan terukur baik dari segi waktu, biaya, kelengkapan administrasi yang diperlukan, serta petugas/penanggungjawab yang melayani.

KEPUTUSAN
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 326/A/DIKBUD-D TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN (SP) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- PERTAMA :** Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan BOSP Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kubu Raya.
- KEDUA :** Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan BOSP Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kubu Raya yang dipergunakan sebagai acuan pengajuan dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan BOSP Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kubu Raya yang dipergunakan sebagai acuan penyampaian laporan fisik Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

SOP Verval RKAS

FORM 3. SOP VERIFIKASI DAN VALIDASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA									
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		Satuan Pendidikan	Pengawas Pembina	Tim BOS SMP	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menyerahkan draf RKAS yang sudah di input pada ARKAS kepada pengawas pembina untuk diverifikasi dan divalidasi				Draf RKAS yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Satuan Pendidikan, Bendahara dan Komite Sekolah serta lembar validasi, Raport Pendidikan dan Rekomendasi Perencanaan Berbasis Data	2 Jam	Draf RKAS	RKAS	
2	Menerima dan memeriksa berkas pengajuan RKAS, jika tidak sesuai dikembalikan kepada satuan pendidikan untuk revisi, jika sesuai lembar validasi dan pengesahan ditandatangani dan menyerahkan kembali kepada satuan pendidikan		Tidak Ya		Draf RKAS yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Satuan Pendidikan, Bendahara dan Komite Sekolah serta lembar validasi, Raport Pendidikan dan Rekomendasi Perencanaan Berbasis Data	1 hari	Lembar Validasi dan Pengesahan Pengawas Pembina	RKAS	
3	Menyerahkan RKAS yang telah divalidasi oleh pengawas pembina ke Tim BOS SMP				RKAS dan lembar validasi/pengesahan Pengawas Pembina	1 hari	RKAS yang telah di validasi oleh Pengawas Pembina	RKAS	
4	Menerima RKAS yang sudah divalidasi pengawas Pembina untuk dilakukan verifikasi dan validasi kedua, jika telah sesuai maka disetujui dan diaplikasi Markas, jika belum sesuai dikembalikan ke Satuan Pendidikan untuk diperbaiki.			Tidak Ya	RKAS dan lembar validasi/pengesahan Pengawas Pembina, Lembar Analisa tingkat kerusakan (bagi satuan pendidikan yang mengalokasikan anggaran pemeliharaan ringan)	30 Menit	RKAS yang telah di validasi oleh Pengawas Pembina dan Tim BOS SMP	RKAS	
5	Mengefektifkan RKAS yang sudah divalidasi untuk di dokumentasikan di satuan pendidikan				RKAS dan lembar validasi/pengesahan Pengawas Pembina	30 Menit	RKAS yang telah di validasi oleh Pengawas Pembina dan Tim BOS SMP	RKAS	

SOP Pelaporan BOSP

FORM 3. SOP PELAPORAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA									
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		Satuan Pendidikan	Pengawas Pembina	Tim BOS SMP	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menyerahkan LPJ tahap sebelumnya ke Admin BOS SMP			Tidak Ya	RKAS, SPTJM, Lap. Penggunaan Dana, Lap. Belanja Modai, Lap. Barang Habis Pakai, Lap. BKU, Lap. Buku Kas Pembantu Tunai, Lap. Buku Kas Pembantu Bank, Lap. Buku Pembantu Pajak, Lap. Buku Pembantu Roncian Obyek, Kelengkapan SPJ (Nota/Bukti Belanja/Pembayaran) dan SK Tim BOS, SK Komite, SK Pembagian Tugas Guru, SK GTT/GTY, Foto Copy Buku Rekening	1 hari	SPJ Lengkap	LPJ BOS, RKAS	
2	Menerima LPJ BOS satuan Pendidikan, jika telah sesuai diberikan Lembar validasi Penyampaian LPJ pencairan tahap berikutnya, jika belum sesuai dikembalikan ke satuan pendidikan untuk diperbaiki				Lembar Validasi	2 jam	Lembar Validasi	LPJ BOS, RKAS	

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAS Spirit Percepatan Perencanaan Berbasis Data

Tahapan berikutnya dari aksi perubahan adalah melakukan pendampingan. Kegiatan pendampingan sebelumnya dirancang sebanyak tiga tahap. Tahap pertama dengan sasaran sebanyak 16 SMP Negeri, tahap kedua dengan sasaran sebanyak 38 SMP Swasta, dan tahap ketiga dengan sasaran seluruh SMP yang belum didampingi. Namun seiring menguatnya dukungan terhadap aksi perubahan ini, termasuk dari Bupati Kubu Raya yang turut memberikan dukungan berupa Surat Edaran Nomor 420/1545/DIKBUD tentang Implementasi Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar (terlampir), pendampingan dapat dilakukan dengan lebih cepat dalam satu tahapan pelaksanaan dalam dua hari pelaksanaan, yaitu di hari pertama dengan sasaran seluruh SMP Negeri dan di hari kedua dengan sasaran seluruh SMP Swasta. Semua SMP Negeri maupun SMP Swasta yang menjadi sasaran pendampingan menuangkan hasil pendampingan dalam Berita Acara Pendampingan Penyusunan RKAS. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan cara membimbing secara langsung Kepsek dan operator sekolah untuk mengakses rapor pendidikan melalui platform rapor pendidikan, mengidentifikasi permasalahan dan akar penyebab masalah, mempelajari rekomendasi perencanaan berbasis data, serta merumuskan program dan/atau kegiatan untuk mengatasi akar permasalahan. Selanjutnya membimbing Kepsek dan operator cara melakukan pengeseran anggaran berbasis data rapor pendidikan. Pendampingan dilaksanakan oleh Satker BOSP.



DESKRIPSI

HASIL KEPEMIMPINAN

Implementasi Tahapan Rencana Aksi

11	Mensosialisasikan SP/SOP, Rapor Pendidikan dan pemanfaatannya sebagai basis data perencanaan anggaran BOSP pada jenjang SMP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersosialisasikannya SP dan SOP, Rapor Pendidikan dan PBD 2. Terwujudnya pemahaman yang sama 	Project Leader	Minggu ke-4 Juli 2023	26-27 Juli 2023 (sesuai target)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersosialisasikannya SP dan SOP, Rapor Pendidikan dan PBD; 2. Terwujudnya Pemahaman yang tepat terhadap Rapor Pendidikan dan PBD (sesuai target) 	Kegiatan sosialisasi secara tatap muka	Dokumentasi Foto dan Video
12	Melakukan pendampingan kepada SMP Negeri yang belum mengakses platform Rapor Pendidikan, Rekomendasi Perencanaan Berbasis Data, hingga menuangkannya di RKAS perubahan Tahun Anggaran 2023 (Pendampingan Tahap 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi 16 SMP Negeri yang belum mengakses platform Rapor Pendidikan 2. 16 SMP Negeri yang memiliki kemampuan menyusun RKAS Berbasis Data 	Project Leader	Minggu ke-3 dan ke-4 Juli s/d Minggu ke-2 Agustus 2023	26-27 Juli 2023 (melampaui target)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan terhadap 86 SMP Negeri; 2. 86 SMP Negeri yang didampingi mengakses Rapor Pendidikan; 3. 86 SMP Negeri memiliki kemampuan menyusun RKAS Berbasis Data; 4. 86 SMP Negeri melakukan pergeseran anggaran BOSP (melampaui target) 	Kegiatan Pendampingan	Dokumentasi Foto dan Video, Berita Acara Pendampingan Penyusunan RKAS
13	Melakukan pendampingan kepada SMP Swasta yang belum mengakses platform Rapor Pendidikan dan Rekomendasi Perencanaan Berbasis Data dan menuangkannya kedalam RKAS Tahun Anggaran 2024 (Pendampingan Tahap 2)	38 SMP Swasta memiliki kemampuan menyusun RKAS Berbasis Data Rapor Pendidikan	Project Leader	Bulan Sept-Nov 2023	26-27 Juli 2023 (melampaui target)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan terhadap 70 SMP Swasta; 2. 70 SMP Swasta telah mengakses Rapor Pendidikan; 3. 70 SMP Swasta telah memiliki kemampuan menyusun RKAS Berbasis Data Rapor Pendidikan; 4. 70 SMP Swasta telah melaksanakan pergeseran anggaran BOSP berbasis rapor pendidikan (melampaui target) 	Kegiatan Pendampingan	Dokumentasi Foto dan Video, Berita Acara Pendampingan Penyusunan RKAS
14	Pendampingan kepada seluruh SMP Negeri dan SMP Swasta menyusun RKAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan rekomendasi perencanaan berbasis data Rapor Pendidikan tahun 2023 (Pendampingan Tahap 3).	Seluruh SMP Negeri dan Swasta memiliki kemampuan menyusun RKAS Berbasis Data Rapor Pendidikan	Project Leader	Bulan Des 2023-Mei 2024	26-27 Juli 2023 (melampaui target)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan terhadap 156 SMP Negeri dan Swasta; 2. 144 SMP Negeri dan Swasta telah mengakses Rapor Pendidikan; 3. 144 SMP Negeri dan Swasta telah memiliki kemampuan menyusun RKAS Berbasis Data Rapor Pendidikan; 4. 144 SMP Negeri dan Swasta telah melaksanakan pergeseran anggaran BOSP berbasis rapor pendidikan (melampaui target) 	Kegiatan Pendampingan	Dokumentasi Foto dan Video, Berita Acara Pendampingan Penyusunan RKAS

Seluruh tahapan yang direncanakan pada rancangan aksi perubahan kinerja telah terlaksana dengan baik sesuai jadwal, bahkan beberapa diantaranya lebih cepat dari jadwal. Tahapan yang terlaksana melampaui ekspektasi atau diatas target baik dari segi jadwal/waktu, metode, maupun sasaran pelaksanaan ditandai dengan warna biru.

Tergambar pula beberapa kegiatan yang terlaksana meskipun sebelumnya tidak direncanakan (tahapan nomor 4). Tahapan nomor 4 ini kemudian sangat mempengaruhi jalannya tahapan-tahapan berikutnya sehingga melahirkan beberapa pencapaian yang melampaui ekspektasi atau melampaui target dari segi jadwal pelaksanaan seperti tergambar pada tahapan kegiatan nomor 7, 8, dan 9.

Pada Tabel diatas juga tergambar terbitnya dukungan dari kepala daerah (Bupati Kubu Raya) melalui Surat Edaran Bupati Kubu Raya Nomor: 420/1545/DIKBUD tentang **Implementasi PBD Rapor Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar** (tahapan aksi perubahan nomor 10).

Terbitnya Surat Edaran ini sangat mempengaruhi jalannya tahapan aksi perubahan kinerja berikutnya, yaitu tahapan nomor 11 hingga 14, dimana terjadi percepatan yang sangat signifikan dari rencana. Kegiatan pendampingan yang sedianya akan dilakukan sebanyak 3 tahap pendampingan seiring dukungan dari Bupati Kubu Raya melalui Surat Edaran tersebut seluruh tahapan pendampingan dapat terlaksana pada tahapan jangka pendek pertama yaitu dengan cara pendampingan massif terhadap seluruh SMP Negeri dan Swasta.

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

Implementasi Tahapan Rencana Aksi

CAPAIAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KUALITAS KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN MILESTONE

No	Uraian Tahapan Kegiatan	Target	Indikator	Bobot (%)	Output	Indikator	Bobot (%)	Keterangan
I Jangka pendek:								
1	Berkonsultasi dengan <i>couch</i> terkait rencana aksi perubahan dan jadwal rencana aksi perubahan	Disetujui RAP dan jadwal pelaksanaan	1 Dokumen	5,00	RAP yang telah disetujui beserta jadwal Aksi Perubahan	1 Dokumen	5,00	Sesuai Target
2	Berkonsultasi dengan mentor terkait rencana aksi perubahan dan jadwal rencana aksi perubahan	Disetujui RAP dan jadwal pelaksanaan	1 Dokumen	5,00	RAP yang telah disetujui beserta jadwal Aksi Perubahan	1 Dokumen	5,00	Sesuai Target
3	Membentuk Satuan Kerja (satker) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Jenjang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terbentuknya Satker BOSP Jenjang SMP	1 Dokumen	20,00	Terbentuknya Satker BOSP SMP	1 Dokumen	20,00	Sesuai Target
4	Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Satuan Kerja BOSP Jenjang SMP	Terbitnya SK Kepala Dinas tentang Satker BOSP SMP	1 Dokumen	10,00	Terbitnya SK Kepala Dinas tentang Satker BOSP SMP	1 Dokumen	10,00	Sesuai Target
5	Merumuskan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SP dan SOP) perencanaan anggaran dan pelaporan BOSP jenjang SMP	Tersedianya 2 SP/SOP, yaitu SP/SOP Verival RKAS dan SP/SOP Verval Pelaporan	1 Dokumen	10,00	Terbitnya SK Penetapan SP dan SOP Pelayanan BOSP dan SP/SOP Pelaporan BOSP Jenjang SMP	1 Dokumen	10,00	Sesuai Target
6	Merancang kegiatan sosialisasi SP dan SOP	Persiapan sosialisasi SP dan SOP Pelayanan BOSP secara virtual	1 Dokumen	10,00	Tersosialisasikan nya SP dan SOP Pelayanan BOSP Secara Klasikal	1 Dokumen	10,00	Melampaui Target
7	Merancang kegiatan sosialisasi Rapor Pendidikan dan Pemanfaatan rekomendasi Perencanaan Berbasis Data	Persiapan sosialisasi Rapor Pendidikan dan PBD secara virtual	1 Dokumen	10,00	Tersosialisasikan nya Rapor Pendidikan dan PBD secara Klasikal	1 Dokumen	10,00	Melampaui Target
8	Mensosialisasikan SP/SOP, Rapor Pendidikan dan pemanfaatannya sebagai basis data perencanaan anggaran BOSP pada jenjang SMP.	Terlaksananya sosialisasi SP/SOP secara virtual	1 Dokumen	10,00	Tersosialisasikan nya SP/Sop, dan Rapor Pendidikan	1 Dokumen	10,00	Sesuai Target
9	Melakukan pendampingan kepada SMP Negeri yang belum mengakses platform Rapor Pendidikan, Rekomendasi Perencanaan Berbasis Data, hingga menuangkannya di RKAS perubahan Tahun Anggaran 2023 (Pendampingan Tahap 1)	16 SMP Negeri memiliki kemampuan menyusun RKAS Berbasis Data Rapor Pendidikan	16 SMP Negeri (10,26% dari seluruh SMP)	20,00	1. Pendampingan terhadap 156 SMP Negeri dan Swasta (Pendampingan Keseluruhan dalam 1 tahap) 2. Seluruh SMPN/SMPS melakukan pergeseran anggaran berbasis data rapor pendidikan	Dokumen Pendampingan Terhadap Seluruh SMP Negeri dan Swasta	100%	Melampaui Target
II Jangka menengah:								
1	Melakukan pendampingan kepada SMP Swasta yang belum mengakses platform Rapor Pendidikan dan Rekomendasi PBD dan menuangkannya kedalam RKAS Tahun Anggaran 2024 (Pendampingan Tahap 2)	38 SMP Swasta memiliki kemampuan menyusun RKAS Berbasis Data Rapor Pendidikan	38 SMP Swasta (24,36% dari seluruh SMP)	35,00	-	Dokumen Pendampingan Tahap 2	-	Target Telah Terlaksana pada Jangka Pendek
III Jangka panjang:								
1	Pendampingan kepada seluruh SMP Negeri dan SMP Swasta menyusun RKAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan rekomendasi perencanaan berbasis data Rapor Pendidikan tahun 2023 (Pendampingan Tahap 3).	Seluruh SMP Negeri dan Swasta memiliki kemampuan menyusun RKAS Berbasis Data Rapor Pendidikan	102 SMP Negeri dan Swasta (63,38% dari seluruh SMP)	45,00	-	Dokumen Pendampingan Tahap 3	-	Target Telah Terlaksana pada Jangka Pendek

DESKRIPSI

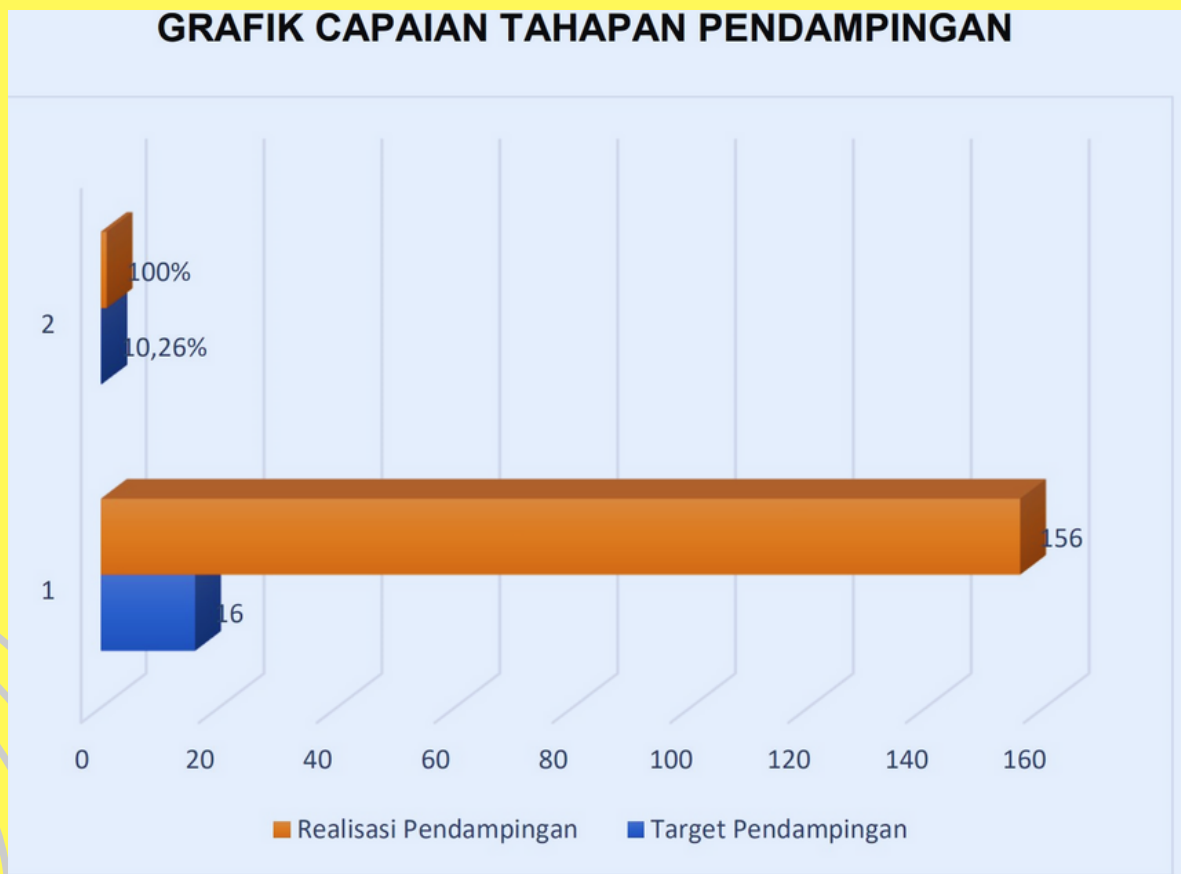
HASIL KEPEMIMPINAN

Implementasi Tahapan Rencana Aksi

Pencapaian Tahapan Pendampingan

Pada Tabel Pencapaian Berdasarkan Milestone terlihat bahwa pada tahapan ke 9 (pendampingan tahap 1) yang sedianya ditargetkan sasarannya hanya 16 SMP Negeri (24,36%) saja, namun di waktu yang sama terlampaui menjadi keseluruhan SMP Negeri dan Swasta berjumlah 156. Artinya realisasi pendampingan telah mencapai 100%, jauh melampaui target jangka pendek. Pencapaian ini disebabkan menguatnya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak.

GRAFIK CAPAIAN TAHAPAN PENDAMPINGAN



DESKRIPSI

HASIL KEPEMIMPINAN

Implementasi Tahapan Rencana Aksi

Pergeseran Kuadran Stakeholder

Sebelum Implementasi (Rancangan Aksi Perubahan)	
(-/±)	(+)
Latens , terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim BOS Pusat 2. BPKAD 3. BPMP 4. Kepala SMP 5. MKKS 	Promoters , terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kabid SMP 4. Admin MARKAS
Apathetics , terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bendaharawan Sekolah 2. Komite Sekolah 3. Admin RKAS 4. Tim BOS Provinsi 5. Dinkes 6. Disdukcapil 7. BNNK 	Defenders , terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrator/Kabid lain 2. Pejabat PengawasSMP 3. Pejabat Renjakeu 4. Pegawai Pembina SMP 5. Pelaksana Administrasi 6. Pelaksana IT

Setelah Implementasi Aksi Perubahan	
Latens , terdiri dari: -	Promoters , terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Daerah (Bupati) 2. Kepala Dinas 3. Sekretaris Dinas 4. Kabid SMP 5. Admin MARKAS 6. Tim BOS Pusat 7. BPMP 8. BPKAD 9. MKKS 10. Kepala SMP
Apathetics , terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim BOS Provinsi 2. Dinkes 3. Disdukcapil 4. BNNK 	Defenders , terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrator/Kabid lain 2. Pejabat PengawasSMP 3. Pejabat Renjakeu 4. Pegawai Pembina SMP 5. Pelaksana Administrasi 6. Pelaksana IT 7. Bendaharawan Sekolah 8. Admin RKAS 9. Komite Sekolah

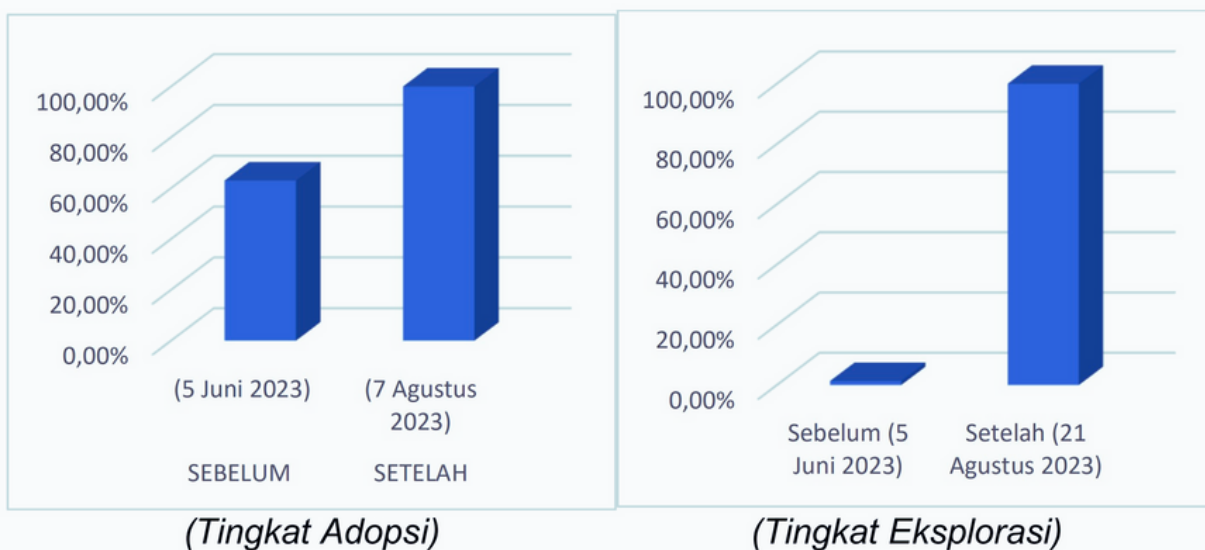
DESKRIPSI

HASIL KEPEMIMPINAN

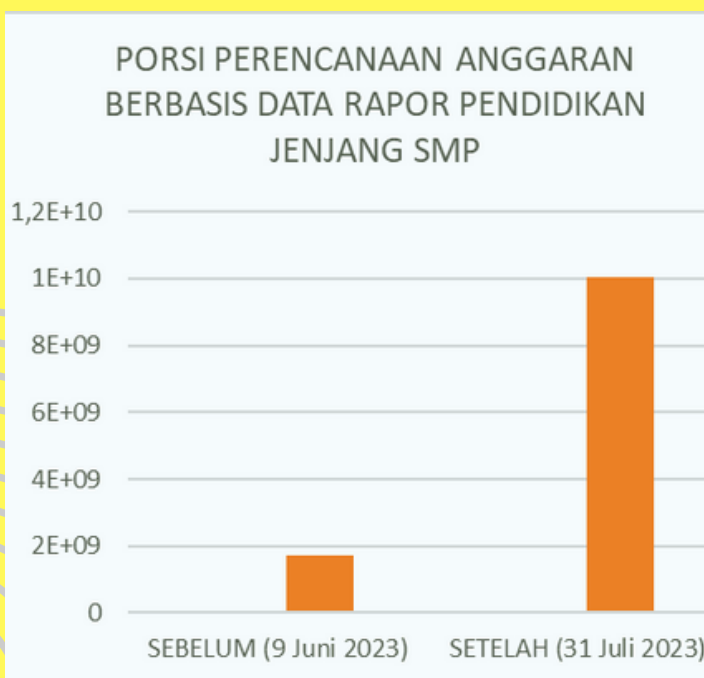
Capaian Peningkatan Kualitas Kinerja

Tingkat Adopsi dan Eksplorasi Rapor Pendidikan Jenjang SMP

GRAFIK PERBANDINGAN TINGKAT ADOPSI DAN EKSPLORASI RAPOR PENDIDIKAN



Capaian Porsi Perencanaan Anggaran Berbasis Rapor Pendidikan



Setelah dilakukan pendampingan terhadap seluruh SMP Negeri dan Swasta dimana seluruh SP yang hadir pada saat itu dilakukan pendampingan untuk mengakses platform rapor pendidikan, melakukan identifikasi permasalahan, dan membenahi akar permasalahan dengan cara merumuskan program dan/atau kegiatan berbasis permasalahan yang tersaji pada rapor. SP yang hadir kemudian melakukan pergeseran anggaran untuk mendukung program dan/ atau kegiatan pada RKAS, terjadi lompatan yang signifikan dari porsi perencanaan anggaran berbasis rapor pendidikan dari Rp 1.735.434.939 atau 5,86% menjadi sebesar Rp 10.041.447.165,- atau 33,93% dari keseluruhan anggaran (Rp 29.591.760.000,-).

DESKRIPSI

HASIL KEPEMIMPINAN

Efektivitas dan Efisiensi yang Dihasilkan

Capaian Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kinerja

Pembentukan Satuan Kerja BOSP

Pembentukan satker pada aksi perubahan ini memberikan nilai efisiensi sebesar Rp 1.073.100.000,-. Ini diperoleh dengan bertambah banyak petugas pelayanan yang berimplikasi pada berkurangnya waktu pelayanan, serta durasi pertemuan untuk berkonsultasi. Secara otomatis juga berpengaruh kepada berkurangnya biaya transportasi dan akomodasi yang harus dikeluarkan oleh sekolah.

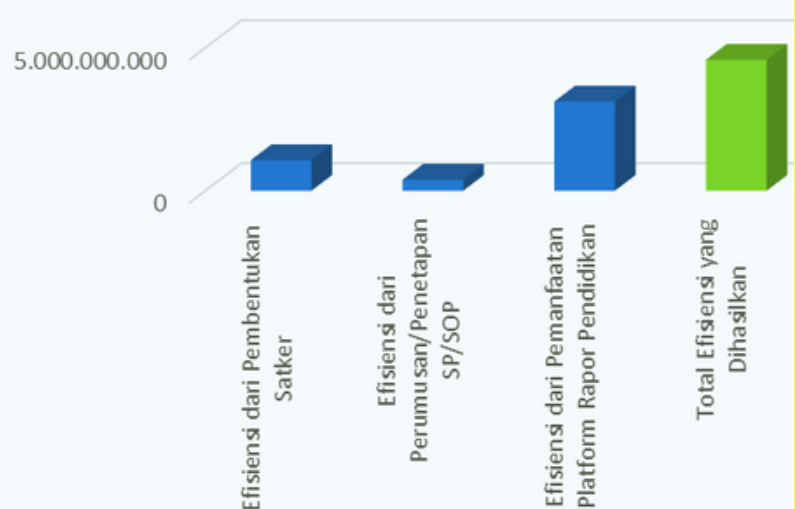
Efektivitas dan efisiensi dari pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan

Rapor pendidikan memberikan sajian informasi yang rinci dan akurat terkait kondisi riil SP seperti kemampuan/capaian literasi, kemampuan/capaian numerasi, karakter peserta didik, keadaan lingkungan SP, dan data-data penting lainnya. Data dan informasi penting ini serupa dengan data hasil pemetaan satuan pendidikan yang biasa dilakukan pihak konsultan swasta dengan tarif dikisaran minimal Rp 20.000.000,- per sekolah. Dengan diaksesnya rapor pendidikan secara gratis maka terjadi efisiensi anggaran sebesar $156 \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 3.120.000.000,-$.

Perumusan SP/SOP Pelayanan BOSP

SP/SOP mengharuskan sekolah untuk memanfaatkan sistem aplikasi ARKAS, tidak lagi penyusunan RKAS secara manual (paperless). Pemanfaatan teknologi informasi memberikan efisiensi biaya dan waktu yang signifikan. Efisiensi dari penggunaan alat tulis kantor (ATK) saja jika diasumsikan masing-masing sekolah memerlukan biaya sebesar minimal Rp 5.000.000,- saja untuk keperluan menyusun RKAS dan Pelaporan setahun $\times 156 \text{ SMP} = \text{Rp } 780.000.000,-$ maka dengan dioptimalkannya pemanfaatan ARKAS maka keperluan ATK untuk keperluan BOSP diperkirakan paling tidak bisa ditekan hingga 50% yaitu sebesar Rp 390.000.000,-.

CAPAIAN EFISIENSI ANGGARAN



**Total Efisiensi yang Dihasilkan:
Rp 4.583.100.000,-**



KEBERLANGSUNGAN AKSI PERUBAHAN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Jalan Abdul Muiz, Tanjung Hulu Postanak Timur 78237
Telepon (0561) 742110, Faksimile (0561) 746618
Laman www.bjppmkalbar.id, Posel mailbox@bjppmkalbar.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si
NIP : 197802182001121001
Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan apresiasi serta siap memberikan dukungan penuh sesuai kewenangan terhadap implementasi Aksi Perubahan Kualitas Kinerja Organisasi yang berjudul: "Optimalisasi Perencanaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Berbasis Data Rapor Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sekabupaten Kuba Raya", yang diimplementasikan oleh:

Nama : SYARIF MUHAMMAD FIRDAUS, S.Pd., M.Pd
NIP : 197609161999031005
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMP (selaku Project Leader)
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuba Raya

Untuk menjamin keberlangsungan atas Aksi Perubahan Kualitas Kinerja Organisasi tersebut maka BPMP Provinsi Kalimantan Barat bersedia untuk:

- Saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam hal:
 - penyediaan data-data penunjang dan data-data terkait lainnya yang diperlukan sesuai kewenangan.
 - pelaksanaan program dan/atau kegiatan terkait implementasi Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Kuba Raya
- Bersama-sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuba Raya melakukan pendampingan lanjutan terhadap Satuan Pendidikan yang masih memerlukan bimbingan, pendampingan dan fasilitasi terkait Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan.

Demikian dukungan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya.

Kedua, 9 Agustus 2023
Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si
NIP. 197802182001121001

**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) SMP
KABUPATEN KUBU RAYA**
Sekretariat : SMPN 1 Sungai Raya, Jl. Adi Sucipto Km. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya. Hp. 08123797666/0812407781

PERNYATAAN DUKUNGAN DAN KOMITMEN

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sungai Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lengkap Beserta Gelar : H. Ahmad Imron, S.Pd., M.Pd.
Nomor Induk Pegawai : 196808171995121002
Jabatan : Ketua MKKS SMP Kabupaten Kubu Raya

Bersama dengan MKKS SMP wilayah 1, 2 dan 3, menyatakan siap berkomitmen dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan satuan pendidikan melalui implementasi Optimalisasi Perencanaan Anggaran BOSP Berbasis Data Rapor Pendidikan Pada Jenjang SMP Sekabupaten Kubu Raya, sesuai dengan kapasitas sebagai pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Kubu Raya. Demikian dukungan dan komitmen ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat ditindaklanjuti.

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Kubu Raya
Sungai Raya, 24 Juli 2023

Ketua, Sekretaris,
H. Ahmad Imron, S.Pd., M.Pd Pangkih Setiyo R., S.Pd
NIP. 196808171995121002 NIP. 196706261997021002

Atas nama :

- MKKS SMP Wilayah 1 H Adnasyah, S.Pd, M.M
- MKKS SMP Wilayah 2 Sukasman, S.Pd. M.Pd.
- MKKS SMP Wilayah 3 Tajudin, S.Pd.

**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Alamat : Jalan Adi Sucipto Km. 15.2 No.Telp (0561) 724416
Website : <http://dikbud.kuburayakab.go.id>
E-Mail : admin@dikbud.kuburayakab.go.id
Sungai Raya
Kode Pos: 78391

PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cawang, S.Pd., M.Pd
NIP : 196703101990011002
Jabatan : Sekretaris Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya

Dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya implementasi Aksi Perubahan Kualitas Kinerja berjudul: "Optimalisasi Perencanaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Berbasis Data Rapor Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sekabupaten Kubu Raya".

Untuk menjamin keberlangsungan atas Aksi Perubahan Kualitas Kinerja Organisasi tersebut maka sesuai dengan kewenangan yang saya miliki akan:

- Memasukkan Implementasi Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan sebagai salah satu Rencana Hasil Kerja yang ikut dinilai pada Penilaian Kinerja pada Bidang Pembinaan SMP secara berjenjang, mulai dari Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional Penyetaraan, dan Pelaksanaan pada Bidang Pembinaan SMP pada periode penilaian tahun 2024.
- Memasukkan Implementasi Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan sebagai salah satu Rencana Hasil Kerja yang ikut dinilai pada Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah dan Kepala SMP pada periode penilaian tahun 2024.
- Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan terkait implementasi Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

Demikian dukungan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya,
Sekretaris,
Cawang, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
196703101990011002

**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Alamat : Jalan Adi Sucipto Km. 15.2 No.Telp (0561) 724416
Website : <http://dikbud.kuburayakab.go.id> E-mail : dikbud@dikbud.kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA
Kode Pos : 78391

Berita Acara Penandatanganan Komitmen Bersama
Nomor : 007/ / Dikbud.D


Pada hari ini ~~Rabu~~ tanggal ~~Tujuh~~ ^{dua puluh enam} tahun ~~dua ribu dua puluh tiga~~ ^{dua ribu dua puluh tiga} bertempat di ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya telah dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama dan memberikan dukungan penuh terhadap Aksi Perubahan Optimalisasi Perencanaan Anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Berbasis Data Rapor Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama se Kabupaten Kubu Raya.

BERITA ACARA DALAM RANGKA MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA TERKAIT AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI PERENCANAAN ANGGARAN BOSP BERBASIS DATA RAPOR PENDIDIKAN JENJANG SMP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. Ayub, S.Pd	Kepala Dinas Dikbud KKR	
2	Sy. M. Firdaus, S.Pd. M.Pd	Kabid Pembina SMP	
3	Mulyadi Basri, S.Pd, M.M	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	
4	Syarif Umar	Kasi Kelembagaan dan Supras SMP	
5	Nur Aludin, S.Sos	Koordinator Peserta Didik SMP	
6	Ishak, S.E, M.M	Perencana Ahli Muda	
7	Utin Yuliani, S.M	Staff Kurikulum dan Penilaian SMP	
8	Suci Sabatini, S.Pd	Staff Kurikulum dan Penilaian SMP	
9	Nuryawati	Staff Kelembagaan dan Supras SMP	
10	Andri Sumarna, S.Kom	Staff Kelembagaan dan Supras SMP	
11	Dean Fernanda, S.H	Staff Kurikulum dan Penilaian SMP	
12	Melrandu Rabilaw, A. Md	Staff Peserta Didik SMP	
13	H. Anwar, S.Pd	Pengawas SMP	
14	Abdullah, M.Pd	Pengawas SMP	
15	Widiyaka, M.Pd	Pengawas SMP	
16	Aisyah, M.Pd	Pengawas SMP	
17	Drs. Slamet Riyadi, M.Pd	Pengawas SMP	
18	Iman Chitri, S.Pd	Pengawas SMP	
19	Saptono, S.Pd	Pengawas SMP	
20	Dihlan, S.Pd	Pengawas SMP	
21	Saliyah, M.Pd	Pengawas SMP	
22	Marianti, S.Pd	Pengawas SMP	
23	Ety Sri Rahayu, M.Pd	Pengawas SMP	
24			

(Pernyataan Dukungan dari Para Pihak terkait Keberlangsungan Aksi Perubahan)

KEBERLANGSUNGAN AKSI PERUBAHAN


BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 25 Juli 2023

Kepada:
Yth. Kepala SD dan SMP
Negeri/Swasta
Se-Kubu Raya


SURAT EDARAN
NOMOR: 420 / 1545 / DIKUBUD


TENTANG
IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS DATA
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 09 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan untuk melakukan penyusunan, pengelolaan program dan/atau kegiatan serta perencanaan penganggaran mengacu pada data Rapor Pendidikan;
2. Perencanaan program dan/atau kegiatan pada Satuan Pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
3. Perencanaan program dan/atau kegiatan pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan tahapan mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas, melakukan pendalaman untuk menemukan akar masalah (refleksi), dan merumuskan langkah perbaikan dalam bentuk perencanaan program dan/atau kegiatan untuk mengatasi akar masalah;
4. Perencanaan program dan/atau kegiatan pada Satuan Pendidikan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan untuk memastikan keseluruhan proses penyusunan, pengelolaan program dan/atau kegiatan serta perencanaan penganggaran mengacu pada data Rapor Pendidikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


BUPATI KUBU RAYA
HENDRAWAN, S.H.


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-5725703 Laman <https://paudidikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 2450/C4-DM.00.02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Rakor PBD Daerah tahun 2023 dan Permsoban Kostak Narahubung

Jakarta, 31 Juli 2023

Yth.
Kepala BBPMP/ BPMP Seluruh Indonesia
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah merilis Rapor Pendidikan bagi pemerintah daerah pada tanggal 5 Juli 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Sekolah Menengah Pertama akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Pemerintah Daerah dengan tujuan mendampingi pemerintah daerah terkait pemanfaatan rapor pendidikan dalam menyusun perencanaan dengan tepat sesuai kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan SPM di daerah.

Kegiatan ini akan diselenggarakan dalam 11 (sebelas) region sesuai jadwal terlampir dengan unsur kepesertaan sebagai berikut :


1. Pejabat/Staf Bagian Perencanaan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
2. Pejabat/Staf yang menangani urusan pendidikan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota;
3. Pejabat/Staf yang menangani urusan pendidikan, pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)/Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mohon Saudara dapat menyampaikan/menginformasikan kontak narahubung dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di atas pada tautan berikut <https://s.id/narahubung-OPD-tahun-2023>.

Daftar kontak narahubung tersebut sebagai rujukan kami untuk menyampaikan undangan Kegiatan Rapat Koordinasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Cich Wahyunarsih (081315144210) dan Sdr. Ferdiansyah Dzaki Auladi No. HP. 085811427950.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ph. Direktur Sekolah Menengah Pertama,

Des. I Nyoman Rudi Kurniawan, M.T.
NIP 196707101990031013

Tembusan:
Dijin PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbudristek.

Catatan:
1. UU/ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik adalah Dokumen Elektronik dan/atau hasil jalannya pemrosesan data yang dapat diproses".
2. Dokumen ini telah dipublikasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ESSE.

(Kebijakan Kemdikbudristek RI dan Bupati Kubu
Raya terkait Perencanaan Berbasis Data)

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari aksi perubahan ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim Satuan Kerja (satker) BOSP dalam rangka optimalisasi perencanaan anggaran BOSP berbasis data rapor pendidikan memberikan kontribusi yang sangat positif.
2. Perumusan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SP/SOP) Pelayanan BOSP memberikan kejelasan mekanisme operasional serta tata kelola pelayanan yang terstandar.
3. Pendampingan terhadap SP merupakan salah satu langkah positif yang harus dilakukan untuk membantu pihak sekolah menyusun program/kegiatan berbasis data rapor pendidikan.
4. Komitmen bersama, menyamakan persepsi, penguatan jejaring dan kolaborasi, membangun budaya adhokrasi, serta dukungan dari seluruh pihak khususnya pengambil kebijakan merupakan faktor-faktor penting demi suksesnya upaya perbaikan kualitas kinerja organisasi.
5. Setelah diimplementasikan aksi perubahan kualitas kinerja sesuai tahapan rancangan diperoleh capaian sebagai berikut:
 - Capaian tingkat adopsi dan eksplorasi rapor pendidikan jenjang SMP di Kubu Raya melonjak menjadi 100% (data tanggal 7 Agustus 2023);
 - Porsi perencanaan anggaran berbasis data melonjak menjadi Rp10.041.447.165,- atau 33,93% (data tanggal 31 Juli 2023);
 - Efisiensi anggaran dengan adanya inovasi aksi perubahan diproyeksi mencapai Rp 4.583.100.000,- per tahun.



REKOMENDASI

Bertitiktolak dari kesimpulan diatas dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk menjamin terlaksananya perencanaan anggaran dana BOSP berbasis data rapor pendidikan perlu dibentuk tim khusus yang memiliki pemahaman serta kecakapan khusus terkait BOSP yang diantaranya bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi perencanaan anggaran SP. Tim khusus yang paling efektif untuk melaksanakan tugas tersebut dapat berbentuk satuan kerja (satker) BOSP.
2. Untuk memperjelas mekanisme pelayanan BOSP perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SP/SOP) Pelayanan untuk menegaskan alur pelayanan mulai dari persyaratan, waktu, metode, penanggungjawab, biaya, dan lain sebagainya.
3. Perlu dilakukan pendampingan secara berkala terhadap SP untuk lebih memantapkan pemahaman terhadap rapor pendidikan dan pemanfaatannya sebagai basis data perencanaan anggaran bagi program dan/ atau kegiatan yang disusun.
4. Memperhatikan pentingnya PBD maka Implementasi PBD harus menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pihak-pihak terkait, mulai dari pihak Dinas, Pengawas Sekolah, maupun Kepala Sekolah.

